

Analisis Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA At-Ta'awun Cikedal Pandeglang

Mochamad Nunu Husnun

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mathla'ul Anwar Banten
pradiptanunu@gmail.com

Ucu

STAI Syekh Manshur Pandeglang
ucudepag@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to explore the management of facilities and infrastructure to ensure effective and efficient management of all facilities and infrastructure at At-Ta'awun High School. As well as providing a safe, comfortable and conducive learning environment for students and staff. This research uses qualitative research with a descriptive method, namely research conducted to determine the existence of independent variables, either only on one variable or more without making comparisons and looking for the relationship between that variable and other variables. The discussion in this research is the policy process for managing school facilities and infrastructure as a series of program plans, activities, actions, decisions, attitudes, to act by the parties as stages for resolving various problems faced. In addition, the implementation of facilities and infrastructure management policies at At-Ta'awun High School illustrates a strong commitment to creating an optimal learning environment for students. Routine maintenance and repairs carried out show awareness of the importance of school facilities in supporting the educational process. Furthermore, the impact of facilities and infrastructure management policies at At-Ta'awun High School can be seen from improving the quality of learning, increasing student achievement, and creating a school environment that is conducive to developing students' overall potential.

Key words: Educational facilities and infrastructure policies

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengelolaan sarana dan prasarana dapat menjamin pengelolaan yang efektif dan efisien dari semua sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun. Serta menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa dan staf. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu proses kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun ini menggambarkan komitmen yang kuat terhadap menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Pemeliharaan rutin dan perbaikan yang dilakukan menunjukkan kesadaran akan pentingnya fasilitas sekolah dalam mendukung proses pendidikan. Selanjutnya, dampak kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun dapat dilihat dari peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan prestasi siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

Kata kunci: Kebijakan sarana dan prasarana pendidikan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan program sekolah dalam permendiknas meliputi pedoman, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, bidang peserta didik, kurikulum, kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan dan kemitraan sekolah. Era persaingan global menuntut pendidikan yang berkualitas yang mampu menjawab tantangan perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Karena pendidikan adalah salah satu sistem dalam masyarakat yang mempunyai peran signifikan dalam memberikan alternatif bagi persoalan sosial kemasyarakatan. Kemajuan dalam pengelolaan pendidikan merupakan indikator kemampuan dan komitmen suatu negara dalam menjamin kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien harus menjadi komitmen bersama dalam segala upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Kecenderungan ini berawal dari kesadaran bahwa diperlukan suatu acuan dasar bagi penyelenggara pendidikan. Acuan tersebut meliputi kriteria minimal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di wilayah hukum NKRI dan kemudian dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ruang lingkup SNP mencakup delapan kriteria,

yakni: 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kom-petensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. SNP dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, SNP juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.¹

Kebijakan pengembangan sarana dan prasana pendidikan merupakan faktor strategis dalam implementasi yang mengarah pada penyediaan. Dalam konteks implementasinya tidak hanya mengarah pada penyediaan tetapi mencakup seluruh komponen yang ada di sekolah. Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar pendidikan yang tertera pada PP No. 19 Tahun 2005 pasal 42. Pasal tersebut dijelaskan bahwa: Pertama setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan,

¹ Tanggela, Martinus. 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Volume 1, Nomor 1 Januari ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615. halaman 26-34

media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya untuk menunjang kelengkapan sarana di sekolah, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kerja, ruang unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, ruang bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan penting yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lembaga pendidikan yang baik harus memiliki sarana dan prasarana memadai agar menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tanpa sarana yang baik, sekolah sulit melahirkan keluaran yang kompeten. Keberadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan berguna untuk penyelenggaraan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses

belajar mengajar menjadi lebih bermakna, berkualitas serta menyenangkan. Hal tersebut sesuai penelitian yang menyebutkan bahwa pengadaan sarana prasarana merupakan faktor utama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran berdasarkan perencanaan yang tepat.²

Kebijakan Di SMA At-Ta'awun selalu membuat mekanisme pembiayaan yang jelas tentang kebutuhan antara dana untuk kebutuhan siswa, pembangunan serta biaya sarana dan prasarana yang ada disekolah. Sehingga kepala sekolah berperan aktif dalam hal ini dengan dibantu oleh wakil kepala, serta semua dewan guru bekerjasama demi kemajuan bersama untuk mengeluarkan biaya pendidikan yang diperlukan.³

Pengelolaan pembiayaan dana Sumbngan Pembinaan Pendidikan adalah upaya agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, dibuat secara bersama, sesuai dengan rencana dan biaya yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan merupakan semua tindakan dalam mengelola administrator secara bersama dari kelembagaan, secara

² Ritonga, Rida Ramadhani DKK. 2023. Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pengadaan Sarana Prasarana (Di SMP Swasta Islam Terpadu Al-Hijrah). Al-Tarbiyah - Vol.1, No.4 Oktober.

³ Saidil Mustar. 2021. *Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Smpn 1 Curup Timur, Rejang Lebong*, Bengkulu. Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam. Vol. 5 No 1.

efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan pembiayaan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan, demokrasi dalam rangka percepatan terwujudnya kesetaraan sosial.⁴

Sumber pembiayaan di SMA At-Ta'awun salahsatunya sumbangan dari dari yayasan yang dikeluarkan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan sekolah yang besarnya ditentukan oleh pengurus yayasan. Serta dialokasikan terhadap kegiatan sekolah sehingga kembali kepada siswa berupa pelayanan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan. Sedangkan sumbangan lainnya yaitu pembiayaan terhadap kegiatan belajar siswa yang kaitannya dengan penunjang belajar seperti praktikum, perpustakaan, ekstrakurikuler, pramuka dan laboratorium.⁵

Pembiayaan di SMA At-Ta'awun penting untuk dilakukan karena merupakan sektor publik yang dapat melayani masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat proses pendidikan tidak akan berjalan sesuai harapan. Permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan sarana dan prasana pendidikan masih mengandalkan

sumbangan yang terbatas, kebijakan belum melibatkan semua pihak serta implementasinya belum merata.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di SMA At-Ta'awun baik dari proses, pelaksanaan maupun dampak kebijakan. Sehingga dapat menjaga stabilitas sekolah dalam menunjang penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sekolah.

KAJIAN TEORETIK

Kebijakan merupakan aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang terarah dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan tujuan.⁶ Sekolah terdapat kebijakan yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah yang disebut dengan kebijakan pendidikan.

Charles O. Jones menyatakan komponen kebijakan pendidikan sebagai berikut: (a) memiliki tujuan pendidikan Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan yang disusun harus lebih terarah dan jelas serta memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap

⁴ Anwar, Dkk, 2018. *Tantangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dalam Konteks Kekinian: Studi Pada Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo*. Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam Vol.1, No.1, Desember 2018, 16-39 ISSN: 2622-965X.

⁵ Nurodin, DKK, 2019. *Implikasi Peran Manajemen Pembiayaan Sekolah Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Madrasah Tsanawiyah As-Sawiyah Kabupaten Bandung*. Jurnal Islamic Education Manajemen (2)267-276 Doi :10.15575/Isema.V4i2.5566.

⁶ Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511-518

dunia pendidikan. Terpenuhinya aspek legal dan formal. Sebelum kebijakan pendidikan dibelakukan maka perlu dipenuhi prasyarat-prasyarat yang agar kebijakan tersebut berlaku sah dan diakui.

Oleh sebab itu perlunya kebijakan tersebut disahkan melalui persyaratan konstitusional berdasarkan hirarki konstitusi yang berlaku sehingga dilahirkan legimasi kebijakan pendidikan.

(b) Memiliki konsep operasional Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat panduan yang bersifat umum. Maka sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diterapkan.⁷ Konsep operasional ini dapat dimiliki agar pencapaian tujuan dapat diukur secara jelas. Dibuat oleh yang berwenang dirumuskan oleh para ahli yang memiliki hak dan wewenang dalam pembuatan kebijakan. Hal ini bertujuan agar tidak timbulnya permasalahan baru yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. (c) Dapat dievaluasi Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi. Suatu kebijakan apabila baik maka kebijakan tersebut dapat dikembangkan. Apabila kebijakan tersebut terdapat kesalahan maka harus dapat diperbaiki. (d) Memiliki sistematika kebijakan pendidikan terdapat sistematika yang berhubungan dengan seluruh aspek

yang terdapat didalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan. Kebijakan juga harus bersifat tidak pragmatis dan deskriminatif. Kebijakan juga tidak boleh bersifat rapuh struktur. Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum baik secara internal maupun eksternal.⁸

Selanjutnya, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana dan prasarana ini mencakup kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Selain itu, kriteria

⁷ Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.

⁸ Elwijaya, fadiyah, Vivi Mairina, Nurhizrah Gistituati. Konsep dasar kebijakan pendidikan. *RTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic). Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 67-71. DOI: <https://doi.org/10.29210/3003817000>

minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan, menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. perencanaan bangunan gedung dan lahan sarana dan prasarana tidak terlepas dari sebuah proses manajemen dalam hal ini adalah planning atau perencanaan sebelum sarana dan prasarana terbangun, sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lahir dan berkembang sebagai konsekuensi metodologis dari paradigma interpretivisme. Suatu paradigma yang lebih idealistik dan

humanistik dalam memandang hakikat manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk berkesadaran, yang tindakan-tindakannya bersifat intensional, melibatkan inter pretatif dan pemaknaan.¹⁰ Metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.

Penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian, dan data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui penyajian data-data berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SMA At-Ta'awun

Sarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan

⁹ Akromusyuhada, Akhmad. 2019. Penerapan Konsep Arsitektur Islam Pada Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sd/Mi, Smp/Mts, Dan Sma/Ma. Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume 4 No. 1 Mei. e-ISSN : 2503 – 5126.

¹⁰ Subadi, Tjipta. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Penerbit Muhammadiyah University Press.

dalam proses pendidikan di sekolah seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran dan lain-lain. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan lain-lain. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan kegiatan penataan, dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan sasaran.¹¹

Sebagaimana wawancara dengan Kepala sekolah bagaimana proses perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini sebagai berikut: Proses perencanaan melibatkan beberapa tahap. Pertama, melakukan evaluasi terhadap kondisi saat ini dari semua fasilitas sekolah, termasuk gedung kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya. Setelah itu, mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, baik untuk pemeliharaan, renovasi, atau pengembangan baru.¹²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa Proses perencanaan yang melibatkan beberapa tahap merupakan langkah yang penting dalam mengoptimalkan fasilitas sekolah. Tahapan evaluasi kondisi saat ini dan identifikasi kebutuhan merupakan langkah awal yang strategis. Melalui refleksi ini, saya ingin menyoroti beberapa aspek kunci dari proses tersebut. Pertama, tahap evaluasi kondisi saat ini mencerminkan komitmen kami untuk memahami secara menyeluruh status fasilitas sekolah. Dengan menilai setiap aspek, mulai dari gedung kelas hingga fasilitas olahraga, kami dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, baik itu terkait pemeliharaan rutin, renovasi, atau bahkan pengembangan baru. Evaluasi ini memberikan landasan yang kuat untuk merencanakan perubahan yang dapat meningkatkan kualitas fasilitas secara keseluruhan.

Selanjutnya, proses identifikasi kebutuhan merupakan langkah untuk menentukan prioritas dalam pengembangan fasilitas sekolah. Dengan mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Selain itu, dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan pemikiran strategis untuk menentukan apakah suatu fasilitas membutuhkan perbaikan kecil, renovasi menyeluruh, atau

¹¹ Miptah Parid , Afifah Laili Sofi Alif. 2020. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tafhim Al-'Ilmi, Februari .

¹² Wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 19 Agustus 2023.

bahkan pembangunan baru. Dengan memprioritaskan kebutuhan yang dapat menyusun rencana yang realistis dan sesuai dengan visi jangka panjang sekolah.

Sebagaimana wawancara dengan Wakasek Sarana dan Prasarana terkait perencanaan pengelolaan yang melibatkan partisipasi seluruh pihak terkait, seperti guru, siswa, dan orang tua sebagai berikut: Sekolah sangat mementingkan partisipasi semua pihak. Selain itu, Sekolah dapat menyelenggarakan pertemuan rutin dengan guru dan staf sekolah untuk mendengarkan masukan mereka mengenai kondisi kelas dan fasilitas pembelajaran. Selain itu, kami juga mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendapatkan pandangan mereka terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap sarana dan prasarana sekolah¹³.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa Partisipasi semua pihak dalam dunia pendidikan merupakan kunci keberhasilan sebuah sekolah. Dalam konteks ini, pengelolaan partisipasi tersebut tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga guru, staf sekolah, dan orang tua. Melibatkan semua pihak ini adalah langkah yang sangat positif, karena setiap kelompok memiliki wawasan dan pengalaman yang berbeda, yang dapat memberikan kontribusi berharga untuk perbaikan dan pengembangan sekolah.

Selanjutnya, pertemuan rutin dengan guru dan staf sekolah merupakan salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Guru dan staf sekolah adalah orang-orang yang bekerja secara langsung dengan siswa dan berada di garis depan dalam penyampaian pendidikan. Memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan masukan mereka mengenai kondisi kelas dan fasilitas pembelajaran dapat membantu pengambil kebijakan sekolah untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Pertemuan tersebut juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan mendukung. Dengan demikian sekolah menjadi lebih terbuka terhadap masukan dari semua pihak yang terlibat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif. Partisipasi ini dapat membantu sekolah untuk merespons lebih cepat terhadap perubahan dan memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana wawancara dengan Kepala Sekolah terkait mengelola anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagai berikut: Kami memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran ini. Tim ini bekerja sama dengan para guru dan staf sekolah untuk membuat perkiraan biaya yang realistis untuk

¹³ Wawancara dengan Wakasek sarana dan Prasarana tanggal 21 Agustus 2023.

pemeliharaan dan pengembangan. Kami juga mencari sumber pendanaan tambahan, seperti hibah atau dana sponsor, untuk memastikan bahwa kebutuhan sekolah terpenuhi tanpa memberatkan keuangan sekolah secara berlebihan.¹⁴

Berdasarkan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.¹⁵

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang harus diutamakan adalah membantu setiap siswa dapat

berkembang secara optimal, yaitu dengan: (1) menyediakan guru yang profesional, (2) menyediakan fasilitas sekolah yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan penuh kegembiraan dengan fasilitas yang memadai; (3) menyediakan media pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar melalui membaca buku rujukan, kelengkapan laboratorium dan perpustakaan (4) evaluasi secara komprehensif dan obyektif.

Perencanaan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah dalam membiayai program pendidikannya. Adanya perencanaan diharapkan seluruh pengeluaran atau pemasukan dalam bentuk uang maupun barang dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini bertujuan supaya dana yang dikeluarkan sesuai efektif dan efisien. Hal ini, bertujuan untuk mengidentifikasi segala pengeluaran dan pemasukan dalam bentuk laporan tertulis. Sistem penganggaran anggaran pendidikan selalu direncanakan dengan menggunakan asas transparansi untuk kepentingan pendidikan. Untuk mendapatkan gambaran dana pendidikan sekolah digunakan aspek perencanaan pengelolaan, pengalokasian dengan melibatkan teknik analisis kebutuhan, sehingga dapat mengukur

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 19 Agustus 2023.

¹⁵ Yuliah, Elih. 2020. *Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies*. Jurnal at-Tadbir. Media Hukum dan Pendidikan Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020. E-ISSN: 2715-3649.

seberapa besar dana yang dapat dikeluarkan.¹⁶

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SMA At-Ta'awun

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah merupakan suatu upaya strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan aman bagi seluruh elemen pendidikan. Kebijakan ini mencakup sejumlah langkah dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sarana serta prasarana sekolah, dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Sebagaimana wawancara dengan Kepala Sekolah bagaimana kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun saat ini sebagai berikut: Di SMA At-Ta'awun, kami sangat memprioritaskan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Kami melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan jika diperlukan agar fasilitas sekolah tetap dalam kondisi baik.¹⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun ini menggambarkan komitmen yang kuat terhadap menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Pemeliharaan rutin dan perbaikan yang dilakukan menunjukkan kesadaran akan pentingnya fasilitas sekolah dalam mendukung proses pendidikan.

Selain itu, kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana mencerminkan kesadaran yang tinggi akan peran krusial fasilitas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah mengakui bahwa lingkungan belajar yang baik dapat memberikan dampak positif pada motivasi dan kinerja siswa. Serta tindakan yang dilakukan dalam pemeliharaan rutin dan perbaikan menegaskan komitmen sekolah untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pendidikan berkualitas. Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa untuk belajar dan berkembang.

Langkah-langkah yang diambil dalam pemeliharaan dan perbaikan menunjukkan bahwa sekolah memiliki kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan aktual. Fleksibilitas untuk melakukan perbaikan jika diperlukan

¹⁶ Mesiono, Suswanto, Rahmat Rifai Lubis, Haidir. 2021. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad>.

¹⁷ Wawancara, dengan Kepala Sekolah tanggal 19 Agustus 2023.

menandakan bahwa pihak sekolah tidak hanya memiliki rencana jangka panjang, tetapi juga siap untuk menanggapi situasi darurat atau perubahan mendadak. Dalam konteks ini, bisa direfleksikan apakah ada keterlibatan siswa dalam pemeliharaan dan penggunaan sarana sekolah. Mungkin ada upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya merawat fasilitas sekolah dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pemeliharaan.

Sebagaimana wawancara dengan Wakasek sarana dan prasarana peran utama kebijakan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa sebagai berikut: Kebijakan ini sangat penting karena sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung proses pembelajaran. Kami berusaha untuk menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan lebih baik dan memiliki pengalaman pendidikan yang menyeluruh.¹⁸

Sebagaimana wawancara dengan Kepala Sekolah terkait apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan bagaimana sekolah mengatasi tantangan tersebut.

Tentu saja, seperti halnya di tempat lain, kami menghadapi tantangan, terutama terkait dengan anggaran. Namun, kami berusaha untuk mencari sumber daya tambahan, baik melalui dukungan pemerintah, sponsor, atau partisipasi aktif komunitas sekolah. Selain itu, kami juga melakukan perencanaan yang matang agar pengelolaan sumber daya dapat lebih efisien.¹⁹

Pelaksanaan kebijakan tersebut: Pertama, kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah merupakan suatu panduan yang terstruktur dan terorganisir untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan mencukupi dan mendukung kegiatan pembelajaran.

Kedua, perencanaan strategis. Pelaksanaan kebijakan dimulai dengan perencanaan strategis yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan masyarakat sekolah. Rencana ini mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana mendukung kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

Ketiga, pemeliharaan berkala, Kebijakan ini menekankan pentingnya pemeliharaan rutin dan berkala terhadap semua fasilitas fisik di sekolah.

¹⁸ Wawancara dengan Wakasek Sarana dan Prasarana tanggal 20 Agustus 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 20 Agustus 2023.

Pemeliharaan ini mencakup perbaikan, pembaruan, dan pembersihan untuk memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik dan aman. Ini mencakup peralatan kelas, perpustakaan, laboratorium, serta ruang-ruang lainnya. Keempat, inovasi dan pengembangan. Pelaksanaan kebijakan juga melibatkan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sekolah agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan pendidikan. Hal ini dapat mencakup pengenalan teknologi modern, peningkatan laboratorium, atau pembangunan ruang kreativitas.

Kelima, pengelolaan keuangan dan sumber daya. Kebijakan ini mencakup tata kelola keuangan dan sumber daya secara efisien. Ini termasuk pengelolaan anggaran untuk pemeliharaan, pengadaan peralatan, dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang tepat guna dan transparan.

Keenam, partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Melibatkan orang tua, wali murid, dan masyarakat sekitar dapat menciptakan dukungan yang lebih besar untuk kebijakan ini, serta memperkuat hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dengan penerapan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik, sekolah

dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mendukung, dan sesuai dengan standar pendidikan yang diinginkan.

Dampak Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SMA At-Ta'awun

SMA At-Ta'awun, sebagai lembaga pendidikan yang komitmen terhadap mutu dan kualitas pembelajaran, telah menerapkan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang berdampak positif secara signifikan terhadap lingkungan belajar. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur pendidikan.

Dalam hal perencanaan, SMA At-Ta'awun Cikedal Pandeglang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada optimalisasi pemanfaatan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Hal ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses belajar-mengajar. Ruang kelas yang bersih, nyaman, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti proyektor dan papan tulis interaktif, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan modern bagi siswa.

Dalam aspek pemeliharaan, kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun turut berdampak pada keberlanjutan fungsi dan

estetika gedung sekolah. Upaya pemeliharaan secara rutin dan proaktif tidak hanya menjaga kelayakan fisik bangunan tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjadi fokus, memberikan kesan positif terhadap sikap dan perilaku siswa terhadap lingkungan sekitar.

Di samping itu, kebijakan pengembangan infrastruktur pendidikan di SMA At-Ta'awun turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Penambahan fasilitas seperti laboratorium sains yang modern, ruang seni, dan sarana olahraga yang memadai, membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di berbagai bidang. Dengan adanya fasilitas ini, siswa dapat mengakses pengalaman belajar yang lebih holistik dan beragam.

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun dapat dilihat dari peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan prestasi siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Kebijakan ini tidak hanya menjadi fondasi bagi pendidikan berkualitas tetapi juga memberikan dampak positif terhadap

budaya sekolah dan citra lembaga dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun ini menggambarkan komitmen yang kuat terhadap menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Pemeliharaan rutin dan perbaikan yang dilakukan menunjukkan kesadaran akan pentingnya fasilitas sekolah dalam mendukung proses pendidikan.

Dampak kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA At-Ta'awun dapat dilihat dari peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan prestasi siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akromusyuhada, Akhmad. 2019. Penerapan Konsep Arsitektur Islam Pada Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

- Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sd/Mi, Smp/Mts, Dan Sma/Ma. Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume 4 No. 1 Mei. e-ISSN : 2503 – 5126.
- Anwar, Herson dan Buhari Luneto. 2018. *Tantangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dalam Konteks Kekinian: Studi Pada Madrasah Aliyah Swasta Kota Gorontalo*. Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam Vol.1, No.1, Desember 2018, 16-39 ISSN: 2622-965X.
- Aflaha, Akhmad, Deden Purbaya, Dedeng Juheri, Ujang Cepi Barlian. 2021. *Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan*. Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman Januari-Juni, Vol. 1, No.1.
- Azis, Rosmiaty. 2018. *Implementasi Pengembangan Kurikulum*. Jurnal Inspiratif pendidikan. Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4932>.
- Desimarnis. 2021. *Analisis Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2559 – 2572.
- Emzir. 2012. *Metodologi penelitian Kualitatif: Analisis data*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Elwijaya, fadiyah, Vivi Mairina, Nurhizrah Gistituati. Konsep dasar kebijakan pendidikan. RTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic). Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 67-71. DOI: <https://doi.org/10.29210/3003817000>.
- Fironika K, Rida. 2015. *Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah pendidikan dasar. Vol 2 Nomor1.
- Musthafa, Luqman Al-Hakim. 2017. *Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Studi Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut)*. Journal Of Islamic Education (JIE) Vol. II No. 2 Nop 2017.
- Mesiono, Suswanto, Rahmat Rifai Lubis, Haidir. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai*. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam. ISSN 1979-9950 (print) || ISSN 2598-0033

- <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad>.
- Mukaffa, Zumrotul. 2012. *Dampak Pemberlakuan PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Eksistensi Sekolah (Studi Deskriptif di MAN Surabaya, MA Amanatul Ummah Surabaya dan MA Ittaqu Surabaya)*. Jurnal Kependidikan Islam. Volume 2, Nomor 1, Tahun.
- Miptah Parid, Afifah Laili Sofi Alif. 2020. *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Tafhim Al-'Ilmi, Februari
- Mutaqin, Mumu Zainal. 2022. *Kebijakan Pendidikan Pada Adaptasi Kebiasaanbarudi SDIT Insan Karima Rangkasbitung*. Jurnal Anak Bangsa Vol. 1, No. 01, Februari, 2022 hal. 1-120
- Nurodin, Ade dan Imam Minhajul K. 2019. *Implikasi Peran Manajemen Pembiayaan Sekolah Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Madrasah Tsanawiyah As-Sawiyah Kabupaten Bandung*. Jurnal Islamic Education Manajemen (2)267-276 Doi :10.15575/Isema.V4i2.5566.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511-518.
- Sahara, Zaini, Muhammad Fuad Zaini, Risma Handayani. 2019. *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Mts Al-Wasliyah Stabat*. Journal Economy And Currency Study (JECS) Volume 1, Issue 2, Juli.
- Saidil Mustar. 2021. *Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Smpn 1 Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu*. Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam. Vol. 5 No 1.
- Solichin, M. (2015). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi*. Religi: Jurnal Studi Islam, 6(2), 148-178.
- Subadi, Tjipta. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Penerbit Muhammadiyah University Press.
- Takdir, Muh dan Muhammad Yusuf, Alimuddin. 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Idaarah, Vol. Iv, No. 2, Desember 2020.

- Tanggela, Martinus. 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Volume 1, Nomor 1 Januari ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615. halaman 26-34.
- Yuliah, Elih. 2020. *Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies*. Jurnal at-Tadbir. Media Hukum dan Pendidikan Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020. E-ISSN: 2715-3649.